

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-10/PM.1/2023

TENTANG

SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PT NARADA ASET MANAJEMEN
(ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON PT NARADA ASET MANAJEMEN)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan ini mengumumkan hasil Pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT Narada Aset Manajemen.

Indonesia Financial Services Authority (OJK) herewith announces the results of the Formal Investigation in the case of violations of Capital Market regulations by PT Narada Aset Manajemen.

Bahwa dengan mempertimbangkan peran atau keterlibatan Pihak-Pihak atas terjadinya pelanggaran pada kasus tersebut dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, pada tanggal 8 Desember 2023 OJK menetapkan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis sebagai berikut:

Considering the role and involvement of each Persons in the violations and in order to create deterrence effect for financial services industry players, on December 8, 2023 OJK imposes administrative sanctions and/or Written Orders as follows:

1. Terhadap PT Narada Aset Manajemen (PT NAM), OJK mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah) dan Perintah Tertulis sebagai berikut:
 - a. melakukan pembayaran hutang *redemption* atas Reksa Dana Narada Saham Indonesia (RD NSI), Reksa Dana Narada Campuran I (RD NC I), Reksa Dana Narada Saham Indonesia II (RD NSI II), dan Reksa Dana Narada Saham Berkah Syariah (RD NSBS);
 - b. melakukan pembayaran hutang kepada Perusahaan Efek yang timbul atas

1. OJK imposes PT Narada Aset Manajemen (PT NAM) penalty of Rp4.600.000.000,00 (four billion six hundred million rupiah) and a Written Orders as follows:
 - a. *settle redemption debt payments for the Reksa Dana Narada Saham Indonesia (RD NSI), the Reksa Dana Narada Campuran I (RD NC I), the Reksa Dana Narada Saham Indonesia II (RD NSI II), and the Reksa Dana Narada Saham Berkah Syariah (RD NSBS);*
 - b. *settle debt payments to Securities Companies arising from purchase*

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



- transaksi beli untuk kepentingan Reksa Dana;
- c. melakukan pembayaran hutang atas perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual/kontrak pengelolaan dana yang telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang;
 - d. melakukan pengakhiran perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual/kontrak pengelolaan dana yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan; dan
 - e. Melakukan pembubaran/likuidasi atas RD NSI, RD NC I, RD NS II, dan RD NSBS.

Selanjutnya, Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d. e di atas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa kewajiban Perintah Tertulis huruf d dan e dilakukan setelah pembayaran poin a, b, dan c di atas.
- b. Bahwa proses pemenuhan Perintah Tertulis di atas dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Dalam proses pemenuhan seluruh Perintah Tertulis di atas, PT NAM wajib terus melaporkan progress pemenuhan dimaksud kepada OJK.

- 2. Sanksi Administratif berupa denda dan Perintah Tertulis tersebut dikenakan karena PT NAM terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- transactions for the benefit of Mutual Funds;*
- c. *settle debt payments for bilateral and individual fund management agreements/fund management contracts that have matured and have not been extended;*
 - d. *terminate bilateral and individual fund management agreements/fund management contracts that are carried out not in accordance with the provisions; And*
 - e. *settle the dissolution/liquidation of RD NSI, RD NC 1, RD NS II, and RD NSBS.*

Furthermore, the Written Orders as intended in letters a to e above is implemented with the following conditions:

- a. *That the obligations of Written Orders letters d and e are carried out after payment of points a, b, and c above.*
- b. *That the process of fulfilling the Written Order above is carried out within a period of 6 (six) months.*

In the process of fulfilling all the Written Orders above, PT NAM is obliged to continue reporting the progress of fulfillment to OJK.

- 2. *The Administrative Sanctions in the form of penalties and Written Orders were imposed because PT NAM was proven to have committed the following violations:*



- a. Ketentuan Pasal 4 POJK Nomor 24/POJK.04/2014 karena PT NAM karena PT NAM tidak memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) atas pelaksanaan fungsi Manajer Investasi, yaitu SOP Fungsi Riset, SOP Perdagangan, SOP Penyelesaian Transaksi Efek, dan SOP Kepatuhan Manajemen Risiko dan Audit Internal. Selanjutnya, PT NAM baru melakukan penyesuaian SOP pada tanggal 10 Juli 2020;
- b. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 POJK Nomor 33/POJK.04/2019 *juncto* Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 23/POJK.04/2016 karena PT NAM memiliki komposisi Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) NAB pada RD NSBS dan tidak melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan;
- c. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana diubah dan diatur sama dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2020 terkait kepemilikan Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) NAB pada RD NSI, RD NC I, dan RD NSI II dan tidak melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- a. *Provisions of Article 4 POJK Number 24/POJK.04/2014 are due to PT NAM because PT NAM does not have an Standard Operational Procedure (SOP) for the implementation of the Investment Manager function, namely the Research Function SOP, Trading SOP, Securities Transaction Settlement SOP, and Risk Management and Internal Audit Compliance SOP. Furthermore, PT NAM only made adjustments to the SOP on July 10, 2020;*
- b. *The provisions of Article 14 paragraph (1) and Article 15 POJK Number 33/POJK.04/2019 juncto Article 8 paragraph (2) POJK Number 23/POJK.04/2016 because PT NAM has a composition of Securities issued by 1 (one) the party is more than 20% (twenty percent) NAV on RD NSBS and does not make adjustments in accordance with the provisions;*
- c. *The provisions of Article 6 paragraph (1) letter d juncto with Article 7 paragraph (2) and Article 8 paragraph (2) POJK Number 23/POJK.04/2016 as amended and regulated are the same in POJK Number 2/POJK.04/2020 because PT NAM related to ownership of Securities issued by 1 Party of more than 10% (ten percent) NAV in RD NSI, RD NC I and RD NSI II and not making*



- d. Ketentuan Pasal 45 huruf d *juncto* Pasal 48 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana diubah dan diatur sama dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2020 atas tidak dilakukannya pembubaran Reksa Dana Narada Milenesia Cash Fund (RD NMCF) karena RD NMCF memiliki NAB kurang dari Rp10 Miliar dan tidak melakukan pembubaran sesuai dengan ketentuan;
- e. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUPM *junctis* Pasal 18, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 33 POJK 43/POJK.04/2015 sebagaimana dicabut dan diatur sama dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 31, Pasal 36, dan Pasal 42 POJK 17/POJK.04/2022 atas transaksi silang antar Reksa Dana PT NAM dengan harga di luar rentang harga bursa sehingga merugikan salah satu Reksa Dana dan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUPM *junctis* Pasal 18, Pasal 25, dan Pasal 28 POJK 43/POJK.04/2015 sebagaimana dicabut dan diatur sama dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 36 POJK 17/POJK.04/2022.
- f. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf g *juncto* Pasal 57 POJK Nomor 33/POJK.04/2019 terkait pengelolaan investasi
- adjustments in accordance with applicable regulations;*
- d. *The provisions of Article 45 letter d juncto with Article 48 POJK Number 23/POJK.04/2016 as amended and regulated the same in POJK Number 2/POJK.04/2020 regarding the non-dissolution of the Reksa Dana Narada Milenesia Cash Fund (RD NMCF) because RD NMCF owns NAV is less than 10 billion Rupiah and does not carry out dissolution in accordance with the provisions;*
- e. *The provisions of Article 27 paragraph (1) UUPM junctis Article 18, Article 25, Article 28 and Article 33 POJK 43/POJK.04/2015 as revoked and re-regulated in Article 23 paragraph (1), Article 31, Article 36 and Article 42 POJK 17/POJK.04/2022 regarding cross transactions between PT NAM Mutual Funds at prices outside the stock exchange price range, causing losses to one of the Mutual Funds and the provision of Article 17 paragraph (1) UUPM Junctis Article 18, Article 25, and Article 28 POJK 43/POJK.04/2015 as revoked and re-regulated in Article 23 paragraph (1), Article 31, and Article 36 POJK 17/POJK.04/2022.*
- f. *The provisions of Article 14 paragraph (2) letter g juncto Article 57 POJK Number 33/POJK.04/2019*



PT NAM atas RD NSBS pada saham FORZ dan LAND yang tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES) dan selanjutnya PT NAM tidak melakukan penjualan saham FORZ dan LAND dimaksud paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak saham tersebut tidak lagi tercantum dalam DES.

- g. Ketentuan Pasal 24 UUPM dan Pasal 27 UUPM *junctis* Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) huruf p, serta Pasal 6 ayat (1) huruf o POJK Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana diubah dan diatur sama dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2020 terkait gagal bayar atas intruksi pembelian saham untuk kepentingan Reksa Dana dimana pada faktanya PT NAM tidak mempunyai *cash fund* yang memadai untuk melakukan pembelian Efek dimaksud sehingga pembayaran atas instruksi beli tersebut dilakukan dengan dana pinjaman 13 (tiga belas) Perusahaan Efek yang menjadi broker dari PT NAM tersebut.
- h. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUPM *junctis* Pasal 21, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 24 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana diubah dan diatur sama dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2020 terkait tidak dilakukannya pembelian kembali dan pembayaran atas Unit Penyertaan RD NSI, RD NSI II, RD NC I, dan RD NSBS

regarding PT NAM's investment management in RD NSBS in FORZ and LAND shares/stocks which are the shares no longer listed on the Sharia Securities List (DES) and subsequently PT NAM is not selling the FORZ and LAND shares in question no later than 10 (ten) working days after the shares are no longer listed in the DES.

- g. *The provisions of Article 24 UUPM and Article 27 UUPM junctis Article 2 paragraph (1), Article 6 paragraph (1) letter p, and Article 6 paragraph (1) letter o POJK Number 23/POJK.04/2016 as amended and re-regulated in POJK Number 2/POJK.04/2020 regarding failure to pay instructions for purchasing shares for Mutual Funds where PT NAM does not have sufficient cash funds to purchase the Securities in question so payment for the purchase instructions is made with borrowed funds 13 (thirteen) The Securities Company which is the broker for PT NAM.*
- h. *The provisions of Article 20 paragraph (2) UUPM junctis Article 21, Article 23 paragraph (1) and paragraph (2), and Article 24 POJK Number 23/POJK.04/2016 as amended and re-regulated in POJK Number 2/POJK.04/ 2020 related to non-purchase and payment of Participation Units of RD NSI, RD NSI II,*



kepada nasabah/pemegang unit penyertaan melebihi 7 (tujuh) hari bursa sejak instruksi *redemption* diterima Manajer Investasi.

- i. Ketentuan Pasal 25 angka 1 UUPM dan Pasal 38 angka 1 POJK Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana diubah dan diatur sama dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2020 karena penyimpanan beberapa Efek Reksa Dana yang dikelola dalam Rekening Efek bukan atas nama Reksa Dana di beberapa Perusahaan Efek. Hal tersebut dikarenakan Efek tersebut digunakan sebagai jaminan kepada Perusahaan Efek dalam rangka penyelesaian transaksi gagal bayar PT NAM.
- j. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf b POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana dicabut dan diatur sama dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b POJK Nomor 17/POJK.04/2022 atas transaksi Efek silang antara Rekening Reksa Dana yang dikelola PT NAM dengan Made Adi Wibawa (Komisaris Utama PT NAM) melalui rekening *nominee*.
- k. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 23/POJK.04/2016 sebagaimana diubah dan diatur sama dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2020 atas kepemilikan Efek lebih besar

RD NC I, and RD NSBS to customers/participation unit holders beyond 7 (seven) trading days after the redemption instruction was received by the Investment Manager.

- i. *The provisions of Article 25 number 1 UUPM and Article 38 number 1 POJK Number 23/POJK.04/2016 as amended and regulated the same in POJK Number 2/POJK.04/2020 due to the storage of several Mutual Fund Securities which are managed in Securities Accounts not in the name of Mutual Funds Funds in several Securities Companies. This is because these Securities/stocks are used as collateral to Securities Companies in the context of resolving PT NAM's default transactions.*
- j. *The provisions of Article 34 paragraph (1) letter b POJK Number 43/POJK.04/2015 as revoked and re-regulated in Article 43 paragraph (1) letter b POJK Number 17/POJK.04/2022 regarding cross securities transactions between Mutual Fund Accounts managed by PT NAM with Made Adi Wibawa (President Commissioner PT NAM) through a nominee account.*
- k. *Provisions of Article 6 paragraph (1) letter c juncto Article 7 paragraph (2) and Article 8 paragraph (2) POJK Number 23/POJK.04/2016 as amended and re-regulated in POJK Number*



dari 5% (lima persen) dari modal disetor Emiten pada RD NSI dan tidak melakukan penyesuaian komposisi Efek tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana dicabut dan diatur sama dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dan Pasal 68 ayat (1) POJK Nomor 17/POJK.04/2022 atas tidak disampaikannya fakta material dalam pengungkapan penempatan komposisi Efek di *Fund Fact Sheet (FFS)* pada RD NSI, RD NSI II, RD NC I, dan RD NSBS sehingga memberikan gambaran yang salah dan dapat menyesatkan nasabah atau calon nasabah dalam memahami produk investasi RD.
- m. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf a dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana dicabut dan diatur sama dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a dan Pasal 68 ayat (1) POJK Nomor 17/POJK.04/2022 *junctis* Pasal 31 UUPM dan Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016 terkait pemasaran dan penjualan Reksa Dana dengan menjanjikan imbal hasil tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah/calon nasabah.

2/POJK.04/2020 regarding Securities ownership greater than 5% (five percent) of the Issuer's paid-up capital in RD NSI and does not make adjustments to the composition of the Securities in accordance with applicable regulations.

1. The provisions of Article 37 paragraph (2) and Article 44 paragraph (1) POJK Number 43/POJK.04/2015 as revoked and re-regulated in Article 58 paragraph (2) letter a and Article 68 paragraph (1) POJK Number 17/POJK.04/2022 regarding the failure to convey material facts in disclosing the composition of Securities in Fund Fact Sheet (FFS) on RD NSI, RD NSI II, RD NC I, and RD NSBS, thus giving a wrong picture and could mislead customers or prospective customers in understanding investment products.
- m. The provisions of Article 37 paragraph (2) letter a and Article 44 paragraph (1) and paragraph (2) POJK Number 43/POJK.04/2015 as revoked and re-regulated in Article 58 paragraph (2) letter a and Article 68 paragraph (1) POJK Number 17/POJK.04/2022 *junctis* Article 31 UUPM and Article 2 Paragraph (1) POJK Number 45/POJK.04/2016 relating to the marketing and sale of Mutual Funds by promising certain returns within a certain



- n. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) *junctis* Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (1) POJK Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah dan diatur sama pada POJK Nomor 23/POJK.01/2019 terkait PT NAM tidak melakukan identifikasi dan mengklasifikasikan nasabah Pemegang Unit Penyertaan (PUP) dalam Form Pembukaan Rekening (FPR) Reksa Dana atas ada atau tidaknya pemilik manfaat rekening tersebut. Sehingga atas hal tersebut, PT NAM tidak dapat memastikan dan melakukan pemantauan atas transaksi yang dilakukan oleh rekening PUP Reksa Dana PT NAM.
- o. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Nomor V.D.5 yang telah dicabut dan diatur sama dalam Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 52 /POJK.04/2020 *juncto* ketentuan Angka 2 Peraturan Nomor VIII.G.17 dan Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.04/2020 yang telah dicabut dan diatur sama pada Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 20/POJK.04/2021 terkait PT NAM tidak memasukkan salah satu rekening bank milik Perusahaan dalam perhitungan dan pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) serta tidak dicatatkan dalam *Chart of Account Laporan Keuangan (off balance sheet)* sesuai dengan ketentuan

period to customers/potential customers.

- n. *Provisions of Article 17 paragraph (1) junctis Article 20 paragraph (1), Article 27 paragraph (1), and Article 44 paragraph (1) POJK Number 12/POJK.01/2017 as amended in POJK Number 23/POJK.01/2019 regarding PT NAM is not identifying and classifying Participation Unit Holder (PUP) customers in Mutual Fund account opening form (FPR) based on whether or not there is a beneficial owner of the account. Because of this, PT NAM cannot confirm and monitor transactions carried out by the PT NAM Mutual Fund PUP account.*
- o. *The provisions of Article 2 of Regulation Number V.D.5 which have been revoked and are re-regulated in Article 4 paragraph (1) POJK Number 52/POJK.04/2020 juncto the provisions of Number 2 of Regulation Number VIII.G.17 and Article 2 POJK Number 1/POJK.04 /2020 which has been revoked and are re-regulated in Article 2 paragraph (1) POJK Number 20/POJK.04/2021 regarding PT NAM does not include one of the Company's bank accounts in the calculation and reporting of Net Adjusted Working Capital (MKBD) and is not recorded in the*



penyusunan Laporan
Keuangan Perusahaan Efek.

- P. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 17 ayat (1) POJK Nomor 21/POJK.04/2017 terkait PT NAM tidak melakukan pengelolaan atas Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab atas pemilihan Efek yang menjadi portofolio KPD sehingga PT NAM tidak dapat melaksanakan penyelesaian hak Nasabah KPD sesuai dengan perjanjian KPD yang telah berakhir (gagal bayar KPD).
- q. Ketentuan Pasal 18 POJK Nomor: 43/POJK.04/2015 sebagaimana dicabut dan diatur sama dalam Pasal 23 ayat (1) POJK Nomor 17/POJK.04/2022 terkait PT NAM tidak membuat dan melaksanakan setiap kebijakan investasi dan melakukan transaksi untuk kepentingan Nasabah berdasarkan alasan yang rasional dimana PT NAM hanya memilih dan bertransaksi pada Efek TGRA dan FORZ sebagai portofolio KPD serta melakukan penjualan Efek TGRA dan FORZ dengan harga jual yang lebih rendah dari pada harga beli di hari yang sama.
- r. Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 19 POJK Nomor 21/POJK.04/2017 terkait PT

Chart of Accounts of the Financial Report (off-balance sheet) in accordance with the provisions for preparing Securities Company Financial Reports.

- P. *The provisions of Article 7 paragraph (2) juncto Article 17 paragraph (1) POJK Number 21/POJK.04/2017 regarding PT NAM not carrying out Discretionary Fund (KPD) management in good faith and with full responsibility for the selection of Securities that become the KPD's portfolio so that PT NAM cannot carry out settlement of KPD Customer rights in accordance with KPD agreements that have expired (failure to pay back the KPD).*
- q. *The provisions of Article 18 POJK Number: 43/POJK.04/2015 as revoked and re-regulated in Article 23 paragraph (1) POJK Number 17/POJK.04/2022 regarding PT NAM is not making and implementing any investment policies and carrying out transactions for the benefit of customers based on rational reasons, PT NAM only chose and transacted on TGRA and FORZ Securities as its KPD portfolio and sold TGRA and FORZ Securities at a lower selling price than the buying price on the same day.*
- r. *The provisions of Article 10 and Article 19 POJK Number 21/POJK.04/2017*

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



NAM tidak melakukan penyimpanan dana KPD nasabah pada Bank Kustodian, namun menyimpan pada pihak afiliasi PT NAM yaitu PT Narada Adikara Indonesia. Selain itu, PT NAM tidak melakukan pelaporan atas KPD PT NAM tersebut kepada OJK sesuai dengan ketentuan.

3. Terhadap Sdr. Garry Hart Hizkia selaku *Sales Retail* Nasional PT NAM dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) bidang Pasar Modal selama 3 tahun karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT NAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 2 huruf m di atas.
4. Terhadap Sdr. Rudy Rudolf selaku *Sales Retail* Nasional PT NAM dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di LJK bidang Pasar Modal selama 3 tahun karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT NAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 2 huruf m di atas.
5. Terhadap Sdr. Nyoman Anie Puspitasari selaku *Chief Marketing Officer* PT NAM dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta

relate to PT NAM not depositing customer KPD funds with a Custodian Bank, but instead depositing them with an affiliate of PT NAM, namely PT Narada Adikara Indonesia. Apart from that, PT NAM did not report PT NAM's KPD to the OJK in accordance with the provisions.

3. *To Mr. Garry Hart Hizkia as National Retail Sales of PT NAM is subject to Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp75.000.000,00 (seventy-five million rupiah) and Written Order in the form of a prohibition on becoming a shareholder, management and/or employee in a Financial Services Institution (LJK) in the Capital Market Sector for 3 years because he was proven as the party that caused PT NAM to commit the violation as referred to in number 2 letter m above.*
4. *To Mr. Rudy Rudolf as the National Retail Sales of PT NAM is subject to Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp75.000.000,00 (seventy-five million rupiah) and Written Order in the form of a prohibition on becoming a shareholder, management, and/or employee in an LJK in the Capital Market sector for 3 years because he was proven as the party that caused PT NAM to commit the violation as referred to in number 2 letter m above.*
5. *To Ms. Nyoman Anie Puspitasari as Chief Marketing Officer of PT NAM is subject to Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp155.000.000,00 (one hundred and fifty-five million*



- rupiah) dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di LJK bidang Pasar Modal selama 3 tahun karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT NAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 2 huruf m dan n di atas.
6. Terhadap Sdr. Rany Dian Febiyani selaku *Head Dealer* PT NAM dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di LJK bidang Pasar Modal selama 3 tahun karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT NAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 2 huruf j di atas.
 7. Terhadap Sdr. Dimay Vito selaku Direktur Utama PT Narada Adikara Indonesia (NAI) dan Pegawai IT & Research PT NAM dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di LJK bidang Pasar Modal selama 3 tahun karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT NAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b, c, f, g, h, j, k, l, dan r di atas.
 8. Terhadap Sdr. Bhisma Waskita Jati selaku Direktur Keuangan PT NAI dan Head HRD PT NAM dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp220.000.000,00 (seratus dua
- rupiah) and Written Order in the form of a prohibition on becoming a shareholder, management and/or employee in an LJK in the Capital Market sector for 3 years because she was proven as the party that caused PT NAM to commit the violation as referred to in numbers 2 letters m and n above.*
6. *To Ms. Rany Dian Febiyani as Head Dealer of PT NAM is subject to Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp60,000,000.00 (sixty million rupiah) and Written Order in the form of a prohibition on becoming a shareholder, management, and/or employee in an LJK in the Capital Market sector for 3 years because she was proven as the party causing PT NAM to commit the violation as referred to in number 2 letter j above.*
 7. *To Mr. Dimay Vito as President Director of PT Narada Adikara Indonesia (NAI) and PT NAM IT & Research Employees are subject to Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp635.000.000,00 (six hundred and thirty-five million rupiah) and Written Order in the form of a prohibition on becoming a shareholder, management and /or employees at LJK in the Capital Market sector for 3 years because he was proven as the party that caused PT NAM to commit violations as referred to in numbers 2 letters b, c, f, g, h, j, k, l and r above.*
 8. *To Mr. Bhisma Waskita Jati as Finance Director of PT NAI and Head of HRD PT NAM is subject to Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp220.000.000,00 (two hundred*



- puluh lima juta rupiah) dan Perintah Tertulis untuk berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di LJK bidang Pasar Modal selama 3 tahun karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT NAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 2 huruf j, n, dan r di atas.
9. Terhadap Sdr. Arif Kurniawan selaku *Research Analyst* PT NAM dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp140.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), Pencabutan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Perintah Tertulis untuk berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di LJK bidang Pasar Modal selama 3 tahun karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT NAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 2 huruf j dan n di atas.
 10. Terhadap Sdr. Indra Prasetya selaku Koordinator Fungsi Perdagangan PT NAM dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Pencabutan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di LJK bidang Pasar Modal selama 3 tahun karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT NAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 2 huruf j di atas.
 11. Terhadap Sdr. I Ketut Mahendra selaku *Fund Manager* PT NAM dikenakan Sanksi Administrasi
- and twenty million rupiah) and Written Order in the form of a prohibition on becoming a shareholder, management and/ or an employee at an LJK in the Capital Markets sector for 3 years because he was proven as the party that caused PT NAM to commit the violations as referred to in number 2 letters j, n, and r above.*
10. *To Mr. Arif Kurniawan as Research Analyst at PT NAM is subject to Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp140.000.000,00 (one hundred and forty million rupiah) as well as Revocation of his Broker-Dealer Representative License, and Written Order in the form of a prohibition on becoming a shareholder, management and/ or an employee at an LJK in the Capital Markets sector for 3 years because he was proven as the party that caused PT NAM to commit the violation as referred to in number 2 letter j and n above.*
 10. *To Mr. Indra Prasetya as the Trade Function Coordinator of PT NAM is subject to Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp60.000.000,00 (sixty million rupiah), as well as Revocation of his Broker-Dealer Representative License, and Written Order in the form of a prohibition on becoming a shareholder, management and/ or employee in an LJK in the Capital Markets sector for 3 years because he was proven as the party causing PT NAM to commit the violation as referred to in number 2 letter j above.*
 11. *To Mr. I Ketut Mahendra as Fund Manager of PT NAM was subject to Administrative Sanctions in the*



Berupa Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di LJK bidang Pasar Modal selama 3 tahun karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT NAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 2 huruf j di atas.

12. Terhadap Sdr. Made Adi Wibawa selaku Komisaris Utama PT NAM dikenakan Sanksi Administrasi Berupa Denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan Perintah Tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di LJK bidang Pasar Modal selama 5 tahun karena terbukti sebagai pihak yang menyebabkan PT NAM melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b, c, f, g, h, j, k, m, n, p, q, dan r di atas.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

form of a Penalty of Rp60.000.000,00 (sixty million rupiah) and Written Order in the form of a prohibition on becoming a shareholder, management and/or employee in an LJK in the Capital Markets sector for 3 years because he was proven as the party causing PT NAM to commit the violation as referred to in number 2 letter j above.

12. *To Mr. Made Adi Wibawa as the President Commissioner of PT NAM is subject to Administrative Sanctions in the form of a Penalty of Rp1.200.000.000,00 (one billion and two hundred million rupiah) and Written Order in the form of a prohibition on becoming a shareholder, management and/or employee in LJK in the Capital Market sector for 5 years because he was proven as the party that caused PT NAM to commit the violations as referred to in numbers 2 letters b, c, f, g, h, j, k, m, n, p, q and r above.*

This announcement should be widely disseminated.

On behalf of the Board of Commissioners of Indonesia Financial Services Authority,

Head of Securities Institution Supervision Department as Acting Deputy Commissioner for the Supervision of Capital Market Investment Management and Securities Institutions



Ditetapkan di
Pada tanggal 08 Desember 2023
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
Kepala Departemen Pengawasan
Lembaga Efek selaku Plh. Deputi
Komisioner Pengawas Pengelolaan
Investasi Pasar Modal dan Lembaga
Efek

Ona Retnesti Swaminingrum

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
2. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
3. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

